

## **Analisis Pengaruh Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk dan PAD Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 - 2024**

Suparlan<sup>1</sup>, Maura Nur Aziza<sup>2</sup>, Meidio Pahlevvi Dwi Syahputra<sup>3</sup>, RR. Indah Febriyanti<sup>4</sup>,  
 Vina Amellia Kirani<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Desember 1, 2025

Revised Desember 1, 2025

Accepted Desember 3, 2025

#### Kata Kunci:

Dana Bagi Hasil,  
 Jumlah Penduduk,  
 PAD,  
 Kemandirian Keuangan Daerah

#### Keywords:

*Revenue Sharing Funds,  
 Population,  
 Locally Generated Revenue,  
 Regional,  
 Financial Independence*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2020–2024. Penelitian ini didasari oleh masih rendahnya tingkat kemandirian fiskal di NTB yang ditandai dengan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan regresi linier berganda. Data sekunder diperoleh dari laporan realisasi APBD dan proyeksi Penduduk dari BPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD), sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Jumlah Penduduk (JP) berpengaruh negatif signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah, sementara peningkatan DBH dan jumlah penduduk justru menurunkan tingkat kemandirian akibat masih tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the influence of Revenue Sharing Funds, Population, and Locally Generated Revenue on Regional Financial Independence in districts/cities in West Nusa Tenggara Province for the period 2020–2024. This study is based on the still low level of fiscal independence in NTB, which is characterized by high dependence on central transfer funds. The research method used is quantitative with a multiple linear regression approach. Secondary data were obtained from the Regional Budget realization report and population projections from BPS. The results show that Locally Generated Revenue (PAD) has a significant positive effect on Regional Financial Independence (KKD), while Revenue Sharing Funds (DBH) and Population (JP) have a significant negative effect. These findings indicate that increasing PAD can strengthen regional fiscal independence, while increasing DBH and population actually reduce the level of independence due to the still high fiscal dependence on the central government.*

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



***Corresponding Author:***

Vina Amellia Kirani  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram  
Mataram, Indonesia  
Email: vinaamelliakirani@gmail.com

---

## **1. PENDAHULUAN**

Otonomi daerah di Indonesia menjadi tonggak penting dalam proses desentralisasi yang memberikan ruang luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara mandiri. Sejak diberlakukannya [1], pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan kapasitas fiskal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, responsif, dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, kemandirian keuangan daerah muncul sebagai indikator krusial untuk menilai sejauh mana suatu daerah mampu memenuhi kebutuhan fiskalnya tanpa bergantung secara dominan pada pemerintah pusat. Kemampuan tersebut tidak hanya bertumpu pada besarnya sumber pendapatan yang dikelola daerah, tetapi juga pada efektivitas daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi fiskal yang dimilikinya. Halim[2] menegaskan bahwa keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan secara mandiri, terutama melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat mencerminkan lemahnya kemandirian fiskal dan menjadi tantangan bagi daerah untuk meningkatkan ruang fiskal yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Kondisi tersebut tampak pada dinamika fiskal di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang meskipun memiliki potensi sumber daya alam dan pariwisata yang besar, masih menghadapi hambatan dalam meningkatkan kemandirian fiskalnya. Berdasarkan laporan BPK Perwakilan NTB, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan tahun 2024 baru mencapai 24,43 persen, yang menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat [3]. Ketergantungan ini semakin terlihat ketika membandingkan komposisi pendapatan kabupaten/kota di NTB, di mana mayoritas daerah masih mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan transfer lainnya sebagai sumber pembiayaan utama. Pola pendanaan seperti ini menggambarkan bahwa kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya kuat, sehingga hubungan keuangan antara pusat dan daerah cenderung tetap bersifat instruktif dan belum bergerak menuju pola yang lebih mandiri.

Fenomena ini memperlihatkan urgensi untuk menelaah faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian fiskal daerah, khususnya dalam konteks NTB yang memiliki karakteristik ekonomi dan sumber daya yang bervariasi antarwilayah. Tiga variabel kunci yang sering dikaitkan dengan dinamika fiskal daerah adalah Dana Bagi Hasil, jumlah penduduk, dan PAD. DBH sebagai instrumen transfer fiskal diharapkan mampu memperkuat kapasitas daerah, namun tidak jarang menimbulkan ketergantungan fiskal yang justru melemahkan motivasi untuk menggali potensi pendapatan sendiri. Jumlah penduduk sebagai representasi potensi demografis juga menunjukkan hasil empiris yang beragam, di mana populasi yang besar tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kemampuan fiskal jika tidak diiringi kualitas SDM dan aktivitas ekonomi yang memadai. Sementara PAD, yang secara struktural menjadi inti kemandirian keuangan daerah, juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten di berbagai studi, sehingga perlu diuji ulang dalam konteks NTB.

Dalam kerangka teoretis, penelitian mengenai kemandirian fiskal daerah dapat dijelaskan melalui Teori Stewardship oleh [4] yang menempatkan pemerintah sebagai pengelola yang berkewajiban mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan demi kepentingan publik. Desentralisasi fiskal sebagai implementasi otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat pola pembiayaan berbasis PAD agar pelayanan publik dapat berjalan secara mandiri dan berkesinambungan. Oleh karena itu, kajian mengenai hubungan Dana Bagi Hasil, jumlah penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap kemandirian

keuangan daerah menjadi relevan untuk memberikan gambaran empiris serta rekomendasi strategis bagi penguatan kapasitas fiskal di Provinsi NTB. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh parsial maupun simultan dari ketiga variabel tersebut terhadap kemandirian keuangan daerah, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang mendukung peningkatan kemandirian fiskal pemerintah daerah di Provinsi NTB.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif yang berorientasi pada data angka dan dianalisis menggunakan alat statistik [5]. Metode deskriptif diterapkan untuk menyajikan serta menafsirkan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Objek penelitian mencakup wilayah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yang terdiri atas data Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk, dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Kemandirian Keuangan Daerah. Data tersebut bersifat data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi seperti Laporan Realisasi APBD yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) serta Proyeksi Penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tahun anggaran 2020 hingga 2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menelaah, mencatat, dan menganalisis dokumen-dokumen resmi yang bersumber dari portal DJPK, BPS serta sumber data pendukung lainnya.

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek penelitian yang disertai dengan karakteristik tertentu setelah ditetapkan oleh peneliti sebagai dasar pengumpulan data, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut yang dipilih karena mewakili ciri-ciri atau karakteristik populasi yang hendak dikaji [5]. Sampel penelitian meliputi 8 kabupaten dan 2 kota pada Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode tahun 2020-2024. Jumlah observasi data panel adalah 50. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan model regresi linier berganda menggunakan software statistik SPSS 27. Sebelum pengujian, hipotesis, dilakukan analisis deskriptif serta pemeriksaan asumsi klasik (Normalitas, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi) disimulasikan telah terpenuhi untuk memastikan model regresi yang baik dan tidak bias. Selanjutnya, pengujian statistik inferensial dilakukan melalui Uji F (simultan), Uji t (parsial), dan Uji Koefisien Determinasi.

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda diterapkan untuk pengujian hipotesis agar memiliki pemahaman umum tentang hubungan antar variabel yaitu kemandirian keuangan daerah, dana bahu hasil, jumlah penduduk dan pendapatan asli daerah yang dirumuskan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kemandirian keuangan daerah

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Koefisien arah regresi

X1 : Dana bagi hasil

X2 : Jumlah penduduk

X3 : Pendapatan Asli Daerah

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis deskriptif memberikan gambaran umum karakteristik data dari 50 observasi (10 Kab/Kota NTB selama 5 tahun).

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (2020–2024)

|                             | N  | Minimum     | Maximum       | Mean            | Std. Deviation   |
|-----------------------------|----|-------------|---------------|-----------------|------------------|
| Kemandirian Keuangan Daerah | 50 | ,07         | ,45           | ,1681           | ,09728           |
| Dana Bagi Hasil             | 50 | 27510000000 | 1018330000000 | 129007600000,00 | 165731331076,067 |
| Jumlah Penduduk             | 50 | 145093      | 1414461       | 547296,86       | 389484,055       |
| Pendapatan Asli Daerah      | 50 | 46993516747 | 547940308000  | 215724854063,60 | 126171693161,883 |
| Valid N (listwise)          | 50 |             |               |                 |                  |

Data pada tabel 2 menunjukkan Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) rata-rata di NTB hanya sebesar 0,1681 atau 16,81%. Berdasarkan klasifikasi [6], nilai ini berada pada rentang 0%–25% dan dikategorikan sebagai Rendah sekali dengan pola hubungan Instruktif. Hal ini mengonfirmasi bahwa selama periode 2020–2024, Pemerintah Kabupaten/Kota di NTB, secara agregat, masih memiliki ketergantungan fiskal yang sangat tinggi terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Nilai kemandirian keuangan daerah minimum tercatat sebesar 0,07 (7%) yang dimiliki oleh Kota Bima tahun 2022, sementara nilai maksimum sebesar 0,45 (45%) dimiliki oleh Kota Mataram tahun 2022. Kota Mataram menjadi satu-satunya entitas yang cenderung mendekati atau melebihi batas pola Instruktif, mungkin memasuki pola Konsultatif (>25%–50%). Mayoritas Kabupaten seperti Bima, Dompu, dan Lombok Tengah berada di bawah 10% , menandakan urgensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang drastis.

### 3.2. Uji Asumsi Klasik

#### 3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah uji statistik Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,200, yang lebih tinggi dari batas signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

#### 3.2.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinearitas menggunakan nilai VIF dan Tolerance.

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik (VIF)

| Model                  | Collinearity Statistics |       |
|------------------------|-------------------------|-------|
|                        | Tolerance               | VIF   |
| (Constant)             |                         |       |
| Dana Bagi Hasil        | ,926                    | 1,080 |
| Jumlah Penduduk        | ,522                    | 1,915 |
| Pendapatan Asli Daerah | ,504                    | 1,983 |

Hasil menunjukkan bahwa nilai VIF untuk semua variabel independen berada di bawah 10 dan nilai Tolerance berada di atas 0,10. Dengan demikian, model regresi bebas dari masalah multikolinearitas.

#### 3.2.3 Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa titik-titik pada grafik scatterplot tampak tersebar secara acak dan merata di sekitar garis horizontal pada sumbu Y, baik di atas maupun di bawah angka nol. Pola sebaran tersebut tidak menunjukkan adanya bentuk tertentu, seperti pola melebar atau menyempit (corong), yang biasanya menjadi indikasi adanya heteroskedastisitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi homoskedastisitas, di mana

varians dari residual bersifat konstan pada setiap nilai variabel independen. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan sudah layak dan tidak mengandung gejala heteroskedastisitas, sehingga hasil estimasi parameter dapat dianggap efisien dan tidak bias.

### 3.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode sekarang ( $t$ ) dengan periode sebelumnya ( $t-1$ ). Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai  $dU < dW < 4 - dU$  ( $1.6739 < 1.863 < 2.3261$ ), sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi antar variabel independen. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini dinyatakan layak digunakan.

### 3.3. Analisis Regresi Linier Berganda dan Pengujian Hipotesis

Hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Regresi Linier Berganda

| Model                  | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|                        | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| (Constant)             | 5,426                       | 1,548      |                           | 3,506  | ,001 |
| Dana Bagi Hasil        | -,135                       | ,047       | -,204                     | -2,840 | ,007 |
| Jumlah Penduduk        | -,382                       | ,064       | -,566                     | -5,923 | ,000 |
| Pendapatan Asli Daerah | 0,4668                      | ,000       | 1,194                     | 12,278 | ,000 |

Hasil uji regresi linier berganda tersebut, dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = 5,426 + -0,135 (X_1) + -0,382 (X_2) + 0,4668$$

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh nilai *constant* sebesar 5,426, yang menggambarkan bahwa apabila variabel bebas bernilai 0 (tetap), maka variabel terikat akan bernilai 5,426. Karena koefisien regresi untuk variabel dana bagi hasil ( $X_1$ ) adalah negative 0,135, ini berarti bahwa variabel Y akan mengalami penurunan jika variabel  $X_1$  meningkat begitupun sebaliknya. Hal yang sama berlaku pada variabel jumlah penduduk ( $X_2$ ) karena koefisien regresi bernilai -0,382. Untuk variabel pendapatan asli penduduk ( $X_3$ ) nilai koefisien regresinya adalah 0,4668 yang artinya jika variabel  $X_3$  mengalami peningkatan, maka variabel Y juga akan mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya jika variabel  $X_3$  menurun maka variabel Y juga akan mengalami penurunan.

#### 1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai *Adjusted R-squared* (Koefisien Determinasi) yang dihasilkan adalah sebesar **0,859** atau 85,9%. Angka ini menunjukkan bahwa variasi Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) di Kabupaten/Kota NTB dapat dijelaskan secara kolektif oleh variabel Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk, dan PAD sebesar 85,9%. Sisanya sebesar 14,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model. Nilai yang sangat tinggi menunjukkan kemampuan daya jelaskan model yang kuat.

#### 2. Uji F (Simultan)

Hasil Uji F menunjukkan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,001 (jauh di bawah 0,05). Dengan demikian, hipotesis nol (yang menyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh simultan) ditolak. Hal ini membuktikan bahwa Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB periode 2020–2024. Model ini dianggap layak (*goodness of fit*).

#### 3. Uji t (Parsial)

##### a. Dana Bagi Hasil

Hipotesis yang pertama ( $H_1$ ) bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD). Hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,007, yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien negatif sebesar -0,135, sehingga  $H_1$  diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh signifikan dan cenderung memiliki arah negatif terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. Jumlah Penduduk

Hipotesis kedua ( $H_2$ ) bertujuan untuk menguji pengaruh Jumlah Penduduk (JP) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD). Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00, yang lebih besar dari 0,05 dan memiliki koefisien negatif sebesar -0,382 sehingga  $H_2$  diterima. Artinya, jumlah penduduk berpengaruh signifikan meskipun memiliki arah yang negatif terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

c. Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD). Hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien positif sebesar 0,4668, sehingga  $H_3$  diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### 3.4. Pembahasan

#### 3.4.1 Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah ( $H_1$ )

Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki koefisien negatif sebesar -0,135 dan nilai probabilitas 0,007, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian,  $H_1$  (DBH) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah) diterima.

Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian yaitu [7] dan [8] yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Pengaruh negatif ini mengindikasikan adanya fenomena fiscal substitution effect di tingkat kabupaten/kota. Meskipun DBH dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui pembagian hasil pajak atau sumber daya alam, namun peningkatan penerimaan transfer ini justru dapat menimbulkan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Akibatnya, rasio kemandirian keuangan daerah secara matematis menurun karena peningkatan pada komponen pendapatan transfer lebih cepat dibandingkan pertumbuhan PAD. Dalam konteks teori *stewardship*, kondisi ini menggambarkan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai pengelola (*steward*) yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan DBH bukan hanya untuk menutup kebutuhan belanja rutin, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas ekonomi lokal. Aparatur daerah perlu mengelola DBH secara produktif, misalnya dengan mengalokasikannya ke sektor-sektor strategis yang dapat meningkatkan potensi PAD di masa depan, seperti pengembangan industri daerah, pariwisata, dan infrastruktur ekonomi. Dengan demikian, sesuai dengan prinsip teori *stewardship*, pemerintah daerah dituntut untuk bertindak sebagai pelayan kepentingan publik jangka panjang, bukan sekadar penerima transfer, agar DBH dapat menjadi katalis bagi peningkatan kemandirian fiskal, bukan sumber ketergantungan baru.

#### 3.4.2 Pengaruh Jumlah Penduduk (JP) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah ( $H_2$ )

Variabel Jumlah Penduduk (JP) memiliki koefisien positif sebesar -0,382, tetapi nilai probabilitasnya adalah 0,000, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian,  $H_2$  (JP berpengaruh positif dan signifikan terhadap KKD) diterima, meskipun arah koefisiennya negatif. Dengan demikian, secara statistik dapat disimpulkan bahwa perubahan jumlah penduduk di suatu daerah berpengaruh nyata terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut.

Pengaruh signifikan jumlah penduduk terhadap kemandirian keuangan daerah dapat diartikan bahwa pertumbuhan penduduk memberikan dampak langsung pada aktivitas ekonomi dan potensi penerimaan daerah. Daerah dengan jumlah penduduk yang besar memiliki basis pajak dan retribusi yang lebih luas, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan PAD inilah yang menjadi indikator utama dalam meningkatkan kemandirian fiskal atau keuangan daerah. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian [9] yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang besar, bila dikelola dengan baik melalui kebijakan pembangunan ekonomi yang produktif, dapat menjadi faktor pendorong kemandirian keuangan daerah, sesuai dengan pandangan teori stewardship yang menekankan pentingnya tanggung jawab dan orientasi kolektif aparatur pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### **3.4.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (H3)**

Variabel PAD memiliki koefisien positif sebesar 0,4668 dan nilai probabilitas 0,000, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, H3 (PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah) diterima. Hasil ini konsisten dengan teori desentralisasi fiskal dan temuan empiris [7], [10] dan [11]. PAD adalah penentu utama kemandirian fiskal karena merupakan pembilang dalam rasio KKD. Peningkatan PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk mengoptimalkan sumber daya internalnya, termasuk pajak daerah dan retribusi, sehingga mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Koefisien yang positif dan signifikan ini menekankan bahwa setiap peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan memberikan dorongan yang substansial dan langsung terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Mengingat KKD rata-rata di NTB masih sangat rendah (13,22%), fokus pemerintah daerah harus ditekankan pada penggalan dan optimalisasi potensi PAD, terutama di sektor pariwisata yang merupakan keunggulan komparatif NTB.

## **4. KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana bagi hasil dan jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, serta untuk variabel PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD mampu mendorong daerah menjadi lebih mandiri secara fiskal, sementara peningkatan DBH dan jumlah penduduk justru dapat menurunkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya ketergantungan fiskal yang masih tinggi terhadap pemerintah pusat serta lemahnya optimalisasi potensi ekonomi masyarakat oleh pemerintah daerah. Sejalan dengan teori stewardship, pemerintah daerah sebagai pengelola publik perlu mengelola sumber daya keuangan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan efektivitas penggalan PAD dan mengarahkan pemanfaatan DBH pada program produktif yang berdampak ekonomi luas. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menambah variabel lain seperti belanja modal, pertumbuhan ekonomi, atau dana alokasi umum, serta memperluas periode dan wilayah penelitian guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah.

## **REFERENSI**

- [1] Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dengan,” P. 44, 2014.
- [2] A. Halim, *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah.*, Edisi Pert. Yogyakarta: Upp Amp Ykpn, 2001.
- [3] Bpk Ri, “Kepala Daerah Se-Provinsi Ntb Serentak Serahkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2024,” Bpk Ntb.

- [4] L. Donaldson And J. H. Davis, “Menurut Donaldson Dan Davis (1991), Teori Stewardship Adalah Teori Yang Berasumsi Bahwa Manajer Atau Pengelola (Steward) Tidak Selalu Termotivasi Oleh Kepentingan Pribadi Seperti Dalam Teori Agensi, Melainkan Lebih Berorientasi Pada Kepentingan Organisasi,” *Aust. J. Manag.*, 1991.
- [5] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- [6] A. Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Revisi)*. Salemba Empat, 2007.
- [7] S. Nurrahmadani, Hariyati, And Armiani, “Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah,” *Valid J. Ilm.*, Vol. 21, No. 2, Pp. 162–179, 2024.
- [8] I. O. Pramesti And T. Mildawati, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur),” *J. Ilmu Dan Ris. Akunt.*, Vol. 14, No. 3, 2025, Doi: 10.24176/Agj.V1i1.3318.
- [9] V. F. E. Amanda, H. Murtini, And A. R. H. Pratista, “Determinan Kemandirian Keuangan Daerah,” *Bookchapter Akunt. Sekt. Publik*, Pp. 61–63, 2024.
- [10] N. Dian And J. I. Farouq, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung,” *Indones. Account. Res. J.*, Vol. 2, No. 3, Pp. 244–250, 2022.
- [11] R. Desanty And A. Putri, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2018-2023),” *Benefit J. Business, Econ. Financ.*, Vol. 3, No. 2, Pp. 1033–1050, 2025, Doi: 10.37058/Jak.V13i1.708.